



Analisis Uang, Bank dan Kebijakan Moneter

Ustad Adil¹, Yadi Janwari², Sofian Al-Hakim³

¹Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ustadil04@gmail.com, yadijanwari@uinsgd.ac.id, sofianalhakim@uinsgd.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Juni 2025

Direvisi: 1 September 2025

Dipublikasikan: 26 September 2025

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI:

<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.110>

Abstract

This research aims to analyze the concepts of money, banking and monetary policy from an Islamic perspective, which is based on the principles of justice and the prohibition of usury. The main focus is how the Islamic financial system contributes to economic stability. The research method used is a qualitative approach by reviewing literature or sources related to the research. The results of this research show that an Islamic monetary system that is free of usury and speculation has the potential to create more sustainable economic stability, as well as the role of Islamic banks in supporting fair monetary policy. These results indicate that Islamic monetary policy is capable of contributing to global financial stability if it is effectively integrated into the modern economic system, although implementation challenges remain.

Keyword: Money, Banks, Monetary Policy, Economic Stability

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro, di mana uang, bank, dan kebijakan moneter memiliki peran sentral (Dini Abdianti, Anisa Restu, 2023). Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat pengukur nilai, penyimpan kekayaan, dan standar pembayaran tertunda, yang semua ini berkontribusi pada kelancaran transaksi ekonomi (Al Arif, 2012). Bank, sebagai lembaga keuangan

yang mengelola arus uang dalam ekonomi, berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalirkannya ke dalam bentuk kredit, investasi, dan pembiayaan lainnya (Irsyad Lubis, 2010). Sedangkan kebijakan moneter, yang dikelola oleh bank sentral, menjadi instrumen utama dalam mengatur pasokan uang, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Nur et al., 2024).

Peran kebijakan moneter menjadi semakin krusial dalam menghadapi tantangan globalisasi, dimana integrasi ekonomi global mempengaruhi arus modal, nilai tukar, serta kondisi makroekonomi suatu negara. Di Indonesia, peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan kebijakan suku bunga (Jumiati, 2022). Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen moneter, seperti suku bunga acuan (*BI-7 Day Reverse Repo Rate*), operasi pasar terbuka, dan pengaturan cadangan wajib minimum, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan moneter tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Latifah, Z., Nusyaifi, W., & Romdhoni, 2024). Stabilitas moneter yang terjaga akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, menstimulasi pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, kebijakan moneter juga menghadapi tantangan dalam hal transmisi kebijakan ke sektor riil, di mana efektivitas kebijakan suku bunga sering kali dibatasi oleh kondisi sektor keuangan dan perbankan yang kompleks (Sarwono & Warjiyo, 2003).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis peran kebijakan moneter di Indonesia dalam menjaga

stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan uang dan bank, serta instrumen kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia, berkontribusi dalam merespons dinamika ekonomi domestik dan global. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan mengusulkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitasnya.

Dengan demikian novelty penelitian ini terletak pada analisis hubungan yang lebih mendalam antara uang, bank, dan kebijakan moneter dalam konteks ekonomi modern. Penelitian ini menggali bagaimana kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral mempengaruhi stabilitas sistem perbankan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan pendekatan baru dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti globalisasi dan teknologi digital yang mempengaruhi dinamika pasar uang dan sektor perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan moneter di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai

sumber, seperti laporan Bank Indonesia, laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan publikasi akademik yang relevan.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi Kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang terkait dengan uang, bank, dan kebijakan moneter, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, laporan, dan publikasi lainnya. Dokumentasi diambil dari dokumen-dokumen resmi, seperti laporan Bank Indonesia dan OJK, serta data statistik dari BPS yang berhubungan dengan kebijakan moneter dan kondisi ekonomi Indonesia.

Analisis data dianalisis secara kualitatif dengan metode content analysis untuk melihat pola, tren, dan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Analisis juga akan mencakup evaluasi terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uang, Bank dan Kebijakan Moneter Sebuah Teori

Uang mencakup berbagai konsep yang menjelaskan fungsi, jenis, dan peran uang dalam perekonomian. Uang, sebagai alat tukar, berfungsi untuk memfasilitasi transaksi, menghindari kesulitan barter, dan meningkatkan efisiensi dalam perdagangan (Nurlaeli, 2024). Terdapat tiga fungsi utama uang yaitu sebagai alat tukar, yang memungkinkan individu untuk

menghindari kesulitan hitung, yang menyediakan standar untuk mengukur nilai barang dan jasa, serta sebagai penyimpan nilai, yang memungkinkan individu untuk menunda konsumsi dan menyimpan kekayaan dalam bentuk yang stabil dari waktu ke waktu (Mansur, 2009). Uang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk uang tunai (uang fisik seperti koin dan kertas), uang giral (uang yang ada dalam rekening bank dan dapat diakses melalui cek atau kartu debit), dan uang elektronik (uang dalam bentuk digital).

Dalam teori moneter, konsep jumlah uang yang beredar dalam perekonomian diatur melalui berbagai kebijakan moneter, yang berpengaruh terhadap inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi (Sarwono & Warjiyo, 2003). Teori nilai uang, seperti Teori Kuantitas Uang, menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga, di mana peningkatan jumlah uang yang beredar tanpa peningkatan yang sebanding dalam output dapat menyebabkan inflasi. Selain itu, peran uang sebagai instrumen kepercayaan juga sangat penting, karena nilai uang tergantung pada keyakinan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang teori uang sangat penting untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif serta untuk memahami dinamika pasar keuangan(Hafizd et al., 2024).

Sedangkan bank mencakup pemahaman mendalam mengenai fungsi, peran, dan struktur lembaga keuangan yang beroperasi dalam sistem ekonomi (Muarief, 2024). Bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana (penabung) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam), sehingga memungkinkan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Fungsi utama bank meliputi pengumpulan simpanan, pemberian pinjaman, dan penyediaan layanan pembayaran.

Dalam konteks intermediasi keuangan, bank mengubah jatuh tempo dan risiko dari simpanan jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang, yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi (Satria & Subegti, 2010). Teori bank juga mencakup konsep struktur modal, di mana bank perlu mempertahankan rasio kecukupan modal yang memadai untuk menyerap kerugian dan menjaga kepercayaan nasabah. Selain itu, bank sentral berperan penting dalam mengatur kebijakan moneter, menetapkan suku bunga acuan, dan mengontrol jumlah uang beredar, yang mempengaruhi stabilitas keuangan dan inflasi.

Sementara moneter adalah cabang dari ekonomi makro yang mempelajari peran uang dalam perekonomian, serta bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi variabel-variabel ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran (Fanti et al., 2024). Teori ini berfokus pada hubungan antara jumlah uang yang beredar

dan tingkat harga, di mana konsep dasar seperti Teori Kuantitas Uang menyatakan bahwa perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan berpengaruh langsung terhadap tingkat inflasi, dengan rumus $MV = PQ$, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan Q adalah output riil (Arifin, 2024). Kebijakan moneter, yang dijalankan oleh bank sentral, bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi melalui pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dibagi menjadi kebijakan moneter ekspsansif, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter kontraktif, yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar (Masrufah, 2022).

Selain itu, teori moneter juga membahas berbagai instrumen yang digunakan oleh bank sentral, seperti operasi pasar terbuka, pengaturan suku bunga, dan cadangan wajib, untuk mempengaruhi kondisi likuiditas dalam perekonomian. Dalam konteks ekonomi global, teori moneter juga memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti nilai tukar dan aliran modal internasional, yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter domestik (Alam et al., 2024). Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang teori moneter sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi, serta untuk memahami interaksi antara pasar keuangan,

aktivitas ekonomi, dan stabilitas harga.

Efektivitas Kebijakan Moneter dalam Pengendalian Inflasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, BI telah menggunakan instrumen utama, seperti suku bunga acuan (*BI-7 Day Reverse Repo Rate*) dan operasi pasar terbuka, untuk mengelola likuiditas di pasar uang serta menyesuaikan tingkat suku bunga di pasar keuangan (Saputra, 2017).

Selama periode penelitian, inflasi di Indonesia berhasil dijaga pada kisaran target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu antara 2-4% per tahun. Meskipun terdapat fluktuasi harga komoditas global, seperti minyak dan pangan, kebijakan BI dalam mengendalikan suplai uang terbukti mampu menahan laju kenaikan harga barang dan jasa. Penurunan suku bunga acuan, terutama selama masa pandemi COVID-19, berhasil menjaga inflasi tetap terkendali sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upaya BI dalam mengendalikan ekspektasi inflasi melalui komunikasi kebijakan yang transparan telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga (Jumiati, 2022).

Pengendalian inflasi yang efektif menunjukkan bahwa kebijakan moneter di Indonesia berhasil menstabilkan tingkat harga meskipun ada tekanan dari faktor

eksternal (Septiani et al., 2024). Namun, tantangan utama tetap datang dari volatilitas harga komoditas internasional dan gangguan rantai pasokan global yang memerlukan koordinasi lebih kuat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selain itu, transmisi kebijakan suku bunga acuan ke sektor riil masih memerlukan peningkatan, terutama untuk menjangkau segmen Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) yang menjadi penggerak utama ekonomi.

Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, terutama melalui intervensi di pasar valuta asing (Ningtiyas et al., 2024). Nilai tukar rupiah sering kali dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk kebijakan moneter di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, perubahan harga komoditas, serta arus modal yang masuk dan keluar dari Indonesia.

Selama periode penelitian, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan fluktuasi, tetapi secara umum BI berhasil menjaga stabilitas relatif melalui kebijakan intervensi di pasar valas, penggunaan cadangan devisa, dan kebijakan makroprudensial (Rusmawadi, 2022). Pada tahun-tahun ketika terjadi tekanan eksternal yang signifikan, seperti pada saat The Federal Reserve menaikkan suku bunga, rupiah sempat melemah, namun BI mampu menstabilkan kondisi tersebut dengan langkah-

langkah intervensi dan penyesuaian suku bunga.

Stabilitas nilai tukar rupiah yang tercapai menunjukkan keefektifan BI dalam menghadapi volatilitas eksternal, meskipun masih terdapat ketergantungan besar terhadap kondisi global. Aliran modal asing jangka pendek yang sangat berfluktuasi menjadi tantangan besar, sehingga kebijakan moneter harus lebih fleksibel dan adaptif. Selain itu, diperlukan penguatan cadangan devisa dan koordinasi yang lebih erat dengan kebijakan fiskal untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal (Hidayat, 2024).

Pertumbuhan Ekonomi dan Transmisi Kebijakan Moneter

Penelitian ini juga meneliti hubungan antara kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Suku bunga acuan yang diturunkan selama periode pandemi menjadi salah satu upaya untuk mendorong likuiditas, konsumsi, dan investasi. Hasil menunjukkan bahwa penurunan suku bunga acuan berhasil mendorong penurunan suku bunga kredit, yang kemudian meningkatkan permintaan kredit perbankan (Putri & Iradianty, 2020). Namun, transmisi kebijakan suku bunga ke sektor riil belum optimal, khususnya di sektor-sektor tertentu yang mengalami kesulitan akses pembiayaan.

Secara umum, kebijakan moneter yang lebih longgar selama periode krisis ekonomi terbukti efektif dalam menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih

tajam (Kuncoro, 2021). Meski demikian, kredit yang tersalurkan lebih banyak terserap di sektor-sektor besar, sementara UMKM masih menghadapi hambatan dalam mendapatkan pembiayaan yang lebih terjangkau.

Kebijakan moneter terbukti dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi tantangan dalam transmisi kebijakan masih menjadi masalah penting (Alam et al., 2024). Sektor keuangan harus lebih inklusif agar kebijakan moneter dapat menjangkau seluruh segmen ekonomi. Reformasi pada sektor perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan mengurangi risiko kredit macet menjadi langkah yang diperlukan. Di masa mendatang, strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor UKM akan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan moneter.

Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Salah satunya adalah masalah *time lag* atau jeda waktu antara pelaksanaan kebijakan moneter dengan dampaknya terhadap perekonomian. *Time lag* ini sering kali membuat kebijakan moneter sulit bereaksi cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selain itu, dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi, pengaruh kebijakan moneter negara maju, seperti keputusan Federal Reserve atau Bank Sentral Eropa,

sering kali mempengaruhi likuiditas dan nilai tukar di Indonesia (Yunita et al., 2017).

Ketergantungan terhadap arus modal asing juga membuat ekonomi Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal (Handoyo et al., 2020). Aliran masuk dan keluar modal yang cepat dapat memengaruhi nilai tukar rupiah secara signifikan. Selain itu, digitalisasi di sektor keuangan menambah kompleksitas baru dalam pengaturan kebijakan moneter, karena pergeseran perilaku transaksi dan teknologi baru, seperti mata uang digital, semakin berkembang (Reni Astuti et al., 2023).

Tantangan ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter di Indonesia perlu semakin fleksibel dan responsif terhadap kondisi yang terus berubah, baik di tingkat domestik maupun global. Bank Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas dalam memprediksi dan merespons perubahan global, serta memperkuat koordinasi dengan sektor perbankan dan kebijakan fiskal untuk mengatasi *time lag*. Selain itu, pengembangan sistem keuangan yang lebih inklusif dan digital-ready sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter di era ekonomi digital.

Analisis Uang, Bank, dan Kebijakan Moneter dalam Islam

Dalam konteks Islam, uang, bank, dan kebijakan moneter dipandang melalui lensa hukum syariah yang menekankan keadilan sosial, keseimbangan, dan larangan praktik yang tidak adil atau eksploratif (Kornitasari et al., 2023).

Uang dalam Islam berfungsi sebagai alat tukar, pengukur nilai, dan penyimpan kekayaan, tetapi tidak boleh diperdagangkan sebagai komoditas (Ichsan, 2020). Uang harus berperan sebagai alat untuk memfasilitasi transaksi ekonomi yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Islam tidak mengenal konsep "uang sebagai barang", yang memungkinkan spekulasi atau manipulasi nilai mata uang, sebagaimana dalam sistem konvensional yang berbasis riba.

Islam memandang bahwa uang idealnya memiliki nilai intrinsik (rizal fahlefi, 2021). Oleh karena itu, sejarah Islam mengenal penggunaan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai mata uang, karena nilainya terikat dengan nilai fisik logam. Ini berbeda dengan mata uang fiat modern yang nilainya berdasarkan kepercayaan dan kebijakan pemerintah. Meski demikian, dalam praktik saat ini, banyak negara Muslim menggunakan sistem mata uang fiat, tetapi Islam menekankan bahwa kebijakan moneter yang mengatur uang fiat harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Bank dalam sistem ekonomi Islam harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba, gharar, dan aktivitas spekulatif. Perbankan syariah berfokus pada kemitraan berbasis keuntungan (*profit-sharing*) melalui kontrak-kontrak seperti mudharabah (kemitraan modal-tanpa) dan musharakah (kemitraan usaha). Bank syariah tidak memberikan pinjaman dengan bunga, tetapi terlibat dalam investasi

langsung dan berbagi risiko serta keuntungan dengan nasabah (Rifai, 2020).

Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang luas (Nasution & Batubara, 2023). Tidak hanya mencegah inflasi atau mengendalikan jumlah uang beredar, kebijakan ini juga berupaya untuk mencegah konsentrasi kekayaan dan ketidakadilan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan moneter seharusnya mendukung stabilitas, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mencegah eksloitasi oleh sekelompok orang (Hafizd et al., 2024).

Dalam kebijakan moneter Islam, praktik seperti monopoli, manipulasi nilai mata uang, dan pembentukan uang palsu (inflasi buatan) sangat dilarang, karena dapat merugikan masyarakat. Kebijakan moneter harus mengutamakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang yang sehat, serta menjaga daya beli masyarakat (Syahputra, 2021).

Salah satu prinsip utama kebijakan moneter Islam adalah menjaga keseimbangan dalam ekonomi dan mencegah distorsi pasar yang merugikan (Wulandari & Zulqah, 2020). Prinsip ini menekankan perlunya mekanisme keuangan yang adil untuk memastikan distribusi kekayaan yang seimbang. Pemerintah atau otoritas moneter berperan dalam mengawasi sistem keuangan, tetapi

intervensi harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Zakat dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan moneter dalam Islam, karena berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan (Triantini, 2010). Dengan adanya zakat, kekayaan dari golongan yang mampu dialirkan kepada mereka yang kurang mampu, sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan moneter Islam di dunia modern adalah sistem keuangan global yang didominasi oleh bank sentral berbasis bunga dan sistem fiat (Hasan, 2017). Negara-negara dengan mayoritas Muslim sering kali terpaksa beradaptasi dengan aturan sistem global, meskipun ini tidak selalu sesuai dengan prinsip syariah.

Masih ada tantangan dalam hal pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah, termasuk tentang perbankan syariah dan kebijakan moneter yang adil. Diperlukan edukasi yang terus-menerus untuk memperkuat kesadaran akan manfaat dari sistem ekonomi Islam yang seimbang dan berbasis etika.

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus menghadapi realitas globalisasi dan ketergantungan pada sistem keuangan internasional yang cenderung berbasis bunga (Yuniarti, 2021). Upaya untuk menciptakan alternatif sistem moneter yang sesuai dengan prinsip syariah sering kali terbentur oleh struktur ekonomi dunia yang lebih luas.

Dengan demikian, Islam menawarkan pendekatan holistik terhadap uang, bank, dan kebijakan moneter, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan sosial. Larangan terhadap riba dan spekulasi, serta fokus pada kemitraan, keseimbangan, dan redistribusi kekayaan, merupakan dasar utama dari sistem ekonomi Islam. Meski terdapat tantangan dalam implementasinya di dunia modern, konsep-konsep ini memberikan solusi alternatif untuk menghadapi ketidakadilan dalam sistem ekonomi global konvensional.

SIMPULAN

Perbankan syariah berperan penting dalam sistem ekonomi Islam, di mana fungsi bank bukan hanya sebagai lembaga keuangan komersial, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memfasilitasi pembiayaan yang adil melalui kontrak seperti mudharabah, musharakah, dan murabahah. Kebijakan moneter Islam menekankan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta distribusi kekayaan yang adil. Instrumen zakat digunakan sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Meskipun sistem ekonomi Islam menawarkan solusi etis dan berkelanjutan untuk tantangan ekonomi, penerapannya di dunia modern menghadapi kendala karena dominasi sistem keuangan global yang berbasis bunga. Namun, dengan edukasi yang lebih baik dan upaya untuk menciptakan sistem keuangan

syariah yang kuat, prinsip-prinsip ini memiliki potensi untuk memperbaiki ketidakadilan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Pustaka Setia.
- Alam, R., Nurlaela, N., Syarifuddin, A., & Akal, A. T. U. (2024). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengendalikan Inflasi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 6117-6123.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136-147.
- Arifin, A. H. (2024). Teori Kuantitas Uang. *Ekonomi Moneter*, 15.
- Dini Abdianti, Anisa Restu, S. A.-A. (2023). Artikel 1.pdf. Neraca, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.
- Fianti, V. R. O., Astuti, R. P., & Qomariyah, L. (2024). Kerangka Operasional Dan Analisis Makro Ekonomi Moneter. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 41-44.
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum*

- Ekonomi Syariah*, 3(2), 146–167.
- Handoyo, R. D., Erlando, A., & Septiyanto, I. (2020). Dampak Faktor Eksternal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ecces: Economics, Social, and Development Studies*, 7(1), 1–21.
- Hasan, A. (2017). Dilema Penerapan Emas (Dinar) sebagai Mata Uang Internasional: Study atas Politik Moneter Dunia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(2), 399–420.
- Hidayat, A. N. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Moneter Internasional*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ichsan, M. (2020). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38.
- Judijanto, L., Putri, P. A. A. N., Syamsuri, S., Dewantara, B., & Alfiana, A. (2024). Dampak Inovasi Finansial Teknologi (Fintech) Terhadap Model Bisnis Perbankan dan Keuangan Tradisional. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(1), 1020–1025.
- Jumiati, E. (2022). Kebijakan Moneter Sebagai Pengendali Inflasi Dan Nilai Tukar (Peran Bank Sentral). *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 1–14.
- Kornitasari, Y., Nabella, R. S., Ismail, M., & Manzilati, A. (2023). *Pengantar ekonomi moneter Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Kroniko, H., & Wardana, A. (2024). Hukum Syariah Atas Riba Dan Gharar Ditinjau Dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi Dalam Islam. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 14361–14364.
- Kuncoro, H. (2021). *Ekonomi Moneter: Studi Kasus di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Latifah, Z., Nusyaifi, W., & Romdhoni, W. (2024). Pengaruh Kolaborasi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia. *Iqtishodina*, 7(1), 178–.
- Mansur, A. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 12(1), 155–179.
- Masrufah, L. (2022). Kebijakan Moneter Fiskal dalam Perekonomian. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 8(1), 7–22.
- Muarief, R. (2024). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan*. Asadel Liamsindo Teknologi.
- Nasution, A. M., & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 144–154.
- Ningtiyas, S. D. A., Maghfiroh, S., Hasan, H. M., & Astuti, R. P. (2024). Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 723–726.
- Nur, A., Astuti, R. P., Kevi, M., Afif, K., Rahmawati, N. P., & Ayu, N. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Teori Kebijakan Moneter*. 2, 165–168.
- Nurlaeli, L. (2024). Perkembangan

- Uang sebagai Alat Pembayaran dan Peran Bank Berdasarkan Regulasi di Indonesia: Tinjauan Pustaka: Development of Money as a Payment *Indonesian Scholar Journal of Business Economic & ...*, 01(01), 13–20.
- Putri, A. M., & Iradianty, A. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional 2015-2019. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(8), 1103–1117.
- Rifai, A. B. A. (2020). Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 226–234.
- rizal fahlefi. (2021). *Pemikiran Ekonomi Al-Gozali*. Juris Publishing, Inc.
- Rusmawadi, D. F. (2022). *Analisis Kebijakan Moneter Dalam Mendukung Stabilitas Nilai Tukar di Four Emerging Market*. Fakultas Sosial Sain.
- Saputra, R. D. (2017). Analisis Afektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia Melalui Kebijakan Suku Bunga Acuan Baru Bi Seven Days Reverse Repo Rate. *Jurnal Ilmiah FEB UGM*.
- Sarwono, H. A., & Warjiyo, P. (2003). Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter Dalam SIstem Nilai Tukar Fleksibel: Suatu Pemikiran untuk Penerapannya di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 1(1), 5–23. <https://doi.org/10.21098/bem.p.v1i1.158>
- Satria, D., & Subegti, R. B. (2010).
- Determinasi penyaluran kredit bank umum di Indonesia periode 2006-2009. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(3).
- Septiani, S., Rahmawati, T., Oktariani, V. D., Evi, E., & Fadilla, A. (2024). Peran Kebijakan Moneter di Indonesia dalam Menghadapi Inflasi. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(3), 1–7.
- Syahputra, R. D. (2021). *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 87–100.
- Widyastuti, S. (2019). *Implementasi Etika Islam dalam dunia Islam* (2019th ed.). IRDH Book Publisher.
- Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82–99.
- Yuniarti, D. (2021). Globalisasi Ekonomi Dan Moneter Syariah Di Regional ASEAN: Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Cross-Border*, 4(1), 605–628.
- Yunita, M., Achsani, N. A., & Anggraeni, L. (2017). Pengujian Trilemma Conditions pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 17(2), 4.